

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi daerah untuk mengelola keuangan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja instansi dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambar kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah upaya-upaya untuk mewujudkan *good governance* telah mulai digulirkan dengan membangun instrumen peraturan perundangan. Berdasarkan data yang ada, saat ini perkembangan akuntabilitas di Indonesia dan sistem akuntansi keuangan daerah belumlah sebagaimana diharapkan. Permasalahan yang ada disekitar akuntabilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah, tidak saja dalam tataran peraturan perundangan yang mengaturnya, namun juga daeri mekanisme, metode dan informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja instansi dalam konteks Organisasi pemerintah akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

(Mardiasmo, 2009:21)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengharuskan para pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Informasi tersebut harus disajikan secara terbuka bagi publik, agar publik dapat menilai kinerja pemerintah selama tahun anggaran tersebut terutama dalam bidang pelayanan. Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan pelayanan yang memuaskan bagi publik karena dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dihimpun dari publik.

Dalam perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Fenomena lain ditemukan pada akuntabilitas kinerja instansi di Kabupaten Bandung Barat mendapat penilaian CC. Dikutip dari <http://jabar.tribunnews.com>, Kamis 26 Januari 2017, 20:40 untuk Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemnepan RB). Hal tersebut dinilai mengecewakan oleh sebagian pengamat.

Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembangunan (Puspakolekbang) Holid Nurjamila mengatakan, dengan keluarnya penilaian LAKIP dari Kemnepan RB yang dimana hasilnya mendapatkan nilai CC dan menganggap hasilnya masih mengecewakan walaupun ada kenaikan dari sebelumnya C. Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah KBB atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal. Dirinya menguraikan dalam penilaian lima komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni Perencanaan kerja yang bobotnya 35, Pengukuran kerja, 20 bobot, Pelaporan kerja 15 bobot, Evaluasi kerja hanya 10 bobot dan Pencapaian

kinerja hanya 20 bobot. Dengan demikian KBB hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65.

Holid Nurjamila mengatakan, penilaian CC jika diskoring antara 50-65 bobotnya. Jika melihat skor yang diraih, komponen yang paling mempengaruhi penilaian terletak pada Perencanaan Kerja atau Renstra yang selalu copy paste tiap tahunnya dan kurang selaras dengan RPJMD Visi Misi Bupati. Kemudian menurutnya kekurangan Pemkab KBB terletak juga pada ketidakmampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran. LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi.

Pelaporan keuangan harus membantu dalam memenuhi kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab secara publik dan memungkinkan pengguna menilai pertanggungjawaban tersebut dengan memberikan informasi untuk menentukan apakah pendapatan tahun berjalan cukup untuk membayar layanan tahun berjalan. Menunjukkan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang diadopsi secara hukum, dan menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan hukum atau kontrak keuangan lainnya dan membantu pengguna dalam menilai upaya pelayanan, biaya, dan pencapaian badan pemerintah.

Suatu laporan keuangan akan berkualitas bilamana. Laporan keuangan tersebut dapat diaudit dan hasil auditnya menunjukkan kesesuaian dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kualitas laporan keuangan yang dapat dan telah diaudit akan dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Bambang Pamungkas, 2012:82-93)

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016:13). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pembuat laporan dalam pembuatan keputusan investasi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, handal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Informasi dalam laporan keuangan diketahui banyak diandalkan oleh banyak pihak yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan keuangan di nilai berkualitas apabila memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan; dan dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11)

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka

memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan diketahui banyak diandalkan oleh banyak pihak yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan keuangan di nilai berkualitas apabila memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan; dan dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11)

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintahan daerah adalah keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Dikutip dari www.pikiran-rakyat.com, 9 April 2015, 02:50 menyampaikan laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari 542 pemerintah daerah (Pemda) yang baru diterima laporannya pada Semester II 2014, baru 68 LKPD. Padahal berdasarkan pasal 56 ayat 3 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan harus sudah disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau paling lambat pada akhir Maret.

Penegasan itu disampaikan Harry Azhar Azis dalam sambutannya pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 kepada DPD RI di Jakarta, Rabu (8/4/2015). Harry mengatakan masih adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut, BPK akan terus mendorong kepada

pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan laporan keuangan tersebut secara tepat waktu.

Dengan jumlah aset, ekuitas, pendapatan dan belanja yang besar tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam pembangunan daerah. Sehingga sudah seharusnya pemda dapat mengelola dan mengadministrasikan keuangannya dengan baik dan benar yang diukur dengan indikator perolehan opini WTP dan penggunaan keuangan negara yang ekonomis, efisien dan efektif.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. (Erlina Rasdianto, 2013:21)

Fenomena lain ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung mengakui kelemahan dalam pencatatan kepemilikan aset. Dikutip dalam 16 Juni 2016 17:35 www.inilahkoran.com, kondisi ini yang membuat Pemkab Bandung kembali diganjar opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Bandung Dadang M Naser berdalih, ada perbedaan persepsi dalam pencatatan aset antara Pemkab Bandung dengan BPK. Apalagi, kata dia, BPK menggunakan sistem akrual dalam metode pencatatan pelaporannya.

Seperti pencatatan aset kendaraan, pihaknya hanya mencatat secara plat nomor dan keberadaannya saja. Sedangkan BPK mengharuskan juga Pemkab memasukkan nomor rangka dan nomor mesin. Begitu juga dengan aset sekolah, harus dicatatkan secara detail, mulai dari luas lahan, jumlah ruangan alamat lengkap, dan informasi lainnya. Sedangkan pihaknya hanya mencatat data-data umumnya saja. Hal inilah, kata dia, yang menjadi penyebab Pemkab Bandung kembali meraih opini WDP.

Menurut Dadang Naser, tahun 2015 Kabupaten Bandung mendapatkan opini WDP plus, atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) min. Aset yang masih menjadi masalah. Karena sistem akrual, jadi harus ada penyesuaian, untuk urusan aset ini pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun lalu. Dia pun mengklaim laporannya sudah rapi, namun sayangnya tetap terdapat perbedaan persepsi antara Pemkab Bandung dengan BPK. Meskipun demikian, pihaknya akan merespons dan memperbaiki kekurangan sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Deni Abdulah mengatakan, kembali diraihnya opini WDP ini substansinya bukan hanya masalah administrasi saja. Tapi lebih kepada buruknya manajemen aset.

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum mencapai harapan. Hal ini terlihat dari beberapa opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI yang masih mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia dari tahun 2012 - 2016, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD di Indonesia Tahun 2012-2016

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2012	72	18%	256	63%	6	1%	67	17%	401
2013	105	26%	241	61%	11	3%	41	10%	398
2014	169	44%	188	50%	4	1%	18	5%	378
2015	313	58%	194	36%	4	1%	31	5%	542
2016	375	70%	139	26%	0	0%	23	4%	537

Sumber: IHPS 1 Tahun 2017, BPK RI

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2012, dinyatakan bahwa terhadap 401 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 72 entitas, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 256 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 6 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 67 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan kompetensi yang cukup tinggi. Pada tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada 313 entitas dan tahun 2016 sebanyak 375 entitas.

Sistem akuntansi keuangan daerah berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah diterapkan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pun akan semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Jadi

jelas, bahwa untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. (Devi Roviyantie, 2011)

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. (Devi Roviyantie, 2011)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Devi Roviyantie, 2011) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)". Penulis menggunakan penelitian terdahulu bermaksud untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti; variabel independen (bebas) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kemudian untuk variabel dependen (terikat) adalah kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sangat baik; (2)

kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (3) kompetensi SDM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan secara simultan pengawasan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu (Devi Roviyantje, 2011) yaitu pada tempat penelitian penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Bambang Pamungkas (2012) yaitu “Penerapan Akuntansi Sektor dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi” (Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dijadikan sebagai salah satu “bench mark” dalam menghasilkan pola penegakan akuntabilitas kinerja yang baik bagi instansi pemerintah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya. Pola tersebut ditunjukkan oleh dukungan kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai faktor yang relatif dominan dalam menegakkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena akuntabilitas kinerja instansi yang baik relatif sulit untuk ditegakkan tanpa dukungan dari kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Dampaknya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya maka yang dapat dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Bandung
2. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia pada SKPD Kabupaten Bandung
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bandung
4. Bagaimana Akuntabilitas kinerja instansi pada SKPD Kabupaten Bandung
5. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Bandung
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada SKPD Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan

8. Seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi.
9. Seberapa besar pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi melalui kualitas laporan keuangan

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Menyiapkan diri agar mampu menjadi manusia yang berguna di lingkungan masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan berprofesi agar mudah beradaptasi dengan masyarakat. Menempatkan ilmu yang dipelajari ke dalam dunia kerja yang sebenarnya dan menambah wawasan dalam lingkungan.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia pada SKPD Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui Akuntabilitas kinerja instansi pada SKPD Kabupaten Bandung

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Bandung
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada SKPD Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
9. Untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi melalui kualitas laporan keuangan
10. Untuk mengetahui seberapa besar Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi melalui kualitas laporan keuangan

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, antara lain:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan

Kompetensi Sumber Daya Manusia pada SKPD di Kabupaten Bandung

2. Memberikan kontribusi bagi pengembang sistem informasi untuk memperhatikan minat pemanfaatan sistem informasi, sehingga sistem informasi yang dikembangkan memberikan manfaat bagi organisasi.
3. Memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya sistem informasi akuntansi. Dapat memberikan masukan yang positif untuk melakukan perbaikan perusahaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan serta memberikan gambaran tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya tentang seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan serta dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada SKPD Kabupaten Bandung.

2. Bagi Instansi

Dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terutama pada aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi akuntansi.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian pada masa mendatang.

1.5. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada 14 (empat belas) SKPD yang terdapat di Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang – Bandung dan ntuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan.